



2016, Pendapatan Daerah Dirancang Rp 1 Triliun Lebih

Bangli (Bali Post) -

Pendapatan daerah dalam APBD tahun 2016, dirancang sebesar Rp 1,024 triliun lebih. Hal itu diungkapkan Penjabat (Pj.) Bupati Bangli Dewa Gede Mahendra Putra saat membacakan pidatonya dalam rapat paripurna penyampaian Ranperda tentang Penyertaan Modal pada PT BPD Bali dan PT Jamkrida Bali Mandara serta Nota Keuangan Rancangan APBD Tahun 2016 di DPRD Bangli, Senin (23/11) kemarin.

Dalam rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Bangli Ngakan Made Kutha Parwata, Dewa Mahendra memaparkan pendapatan tersebut dirancang dari berbagai sumber. Di antaranya PAD sebesar Rp 90 miliar lebih yang berasal dari penerimaan pajak daerah Rp 11 miliar, retribusi daerah Rp 22 miliar. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Rp 2 miliar dan lain-lain PAD yang sah Rp 53 miliar.

Selain itu, pendapatan juga dirancang bersumber dari dana perimbangan dalam tahun 2016, yang direncanakan Rp 690 miliar, berasal dari bagi hasil pajak atau bukan pajak Rp 19 miliar lebih, Dana Alokasi Umum (DAU) Rp 568 miliar dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Rp 102 miliar. "Pendapatan daerah juga dirancang bersumber dari pendapatn daerah yang sah Rp 243 miliar," jelasnya.

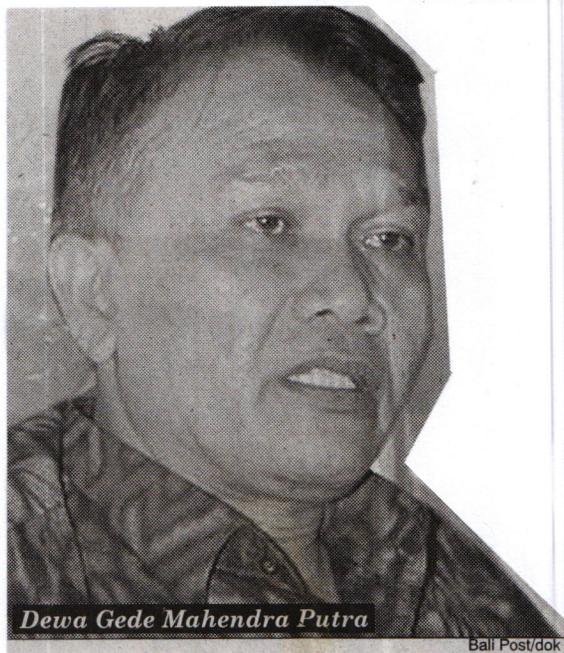
Dalam sidang tersebut, Dewa Mahendra menyampaikan rincian belaja daerah pada APBD 2016, dimana untuk belanja

tidak langsung, pihaknya merancang Rp 704 miliar, yang terdiri belanja pegawai Rp 582 miliar, belanja hibah Rp 400 juta, belanja bantuan sosial (bansos) Rp 500 juta. Sedangkan belanja bagi hasil kepada provinsi, kabupaten/kota dan pemerintahan desa Rp 3 miliar, belanja bantuan keuangan kepada provinsi, kabupaten/kota dan pemerintahan desa Rp 117 miliar dan belanja tidak terduga Rp 1 miliar.

Sementara belanja langsung, jelas Mahendra Putra, dirancang Rp 419 miliar. Dimana, belanja

langsung ini sebagian besar diarahkan untuk memberi dukungan yang lebih besar terhadap pelaksanaan pembangunan yang sangat mendesak dan segera mendapatkan penyelesaian di berbagai bidang sebagaimana yang tertuang dalam RPJM dan RKPD Bangli 2016.

Ditambahkan, pembiayaan daerah dalam APBD dirancang Rp 99 miliar, sementara penerimaan pembiayaan dirancang Rp 105 miliar yang bersumber dari asumsi silpa. Sedangkan pengeluaran pembiayaan dirancang Rp 5 miliar. "Dari komposisi tersebut, kalau kita bandingkan antara jumlah pendapatan dan jumlah belanja, maka posisi RAPBD 2016 dirancang defisit Rp 99 miliar dengan sumber penerimaannya direncanakan dari Silpa," kata Mahendra Putra. (kmb40)



Dewa Gede Mahendra Putra

Bali Post/dok

Edisi : Selasa, 24 November 2015

Hal : 8



Aksi Kriminal di Objek Vital Tinggi Penghapusan Proyek Pemasangan CCTV Dipertanyakan

Denpasar (Bali Post) –

Penghapusan proyek pemasangan *Closed-Circuit Television (CCTV)* dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Badung 2016, memantik amarah wakil rakyat di DPRD Badung. Legislatif meminta pemerintah tidak mencoret usulan program peningkatan keamanan tersebut. “*Detail Engineering Design (DED)* sudah rampung dikerjakan tahun 2015, mengapa harus ditunda untuk dikerjakan? Apalagi anggaran kita besar, pastilah bisa untuk menjalankan program ini,” ujar Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Badung I Gusti Anom Gumanti, Senin (23/11) kemarin.

Pihaknya berharap eksekutif memasang anggaran untuk program Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi Kabupaten Badung tentang pemasangan CCTV. Sebab, pemasangan CCTV mendesak di kawasan pariwisata

Kuta. “Kalau tidak bisa secara menyeluruh di Kabupaten Badung dipasang CCTV, kami minta prioritaskan untuk di Kuta dulu, mengingat aksi kriminalitas cukup tinggi di objek vital Badung,” tegasnya.

Tidak hanya itu, semakin banyaknya teror di Indonesia, membuat kawasan Kuta perlu mendapat pengamanan khusus. “Demi alasan keamanan ini, kami akan kawal agar program CCTV untuk pengamanan kawasan Kuta bisa dianggarkan tahun 2016,” paparnya.

Hal senada diungkapkan anggota Komisi I DPRD Badung, Wayan Regap. Menurutnya, pemasangan CCTV di Kabupaten Badung harus menjadi skala prioritas. “Program lampu penerangan jalan mungkin menjadi program tahun 2016, tetapi pengamanan juga perlu diperhatikan. Saya setuju pemasangan CCTV juga menjadi prioritas dalam APBD 2016 mendatang, karena DED-nya juga sudah rampung dikerjakan tahun 2015 ini,” paparnya.

Lebih lanjut politisi PDI Perjuangan ini mengungkapkan, aksi teror ISIS juga mulai mencekam dan pengamanan juga harus ekstra-tetat di pintu-pintu masuk Badung, terutama objek wisata Kuta. Dengan bantuan CCTV ini, pastilah akan membantu dalam pengamanan di wilayah tersebut. “Kami di lembaga Dewan siap akan ikut memperjuangkan program itu,”



Berita ini bisa dikomentari pada acara Citra Bali Radio Global FM Pukul 08.00 - 09.30 wita.

Hubungi telepon 085 100 400 391, (0361) 819446

pungkasnya.

Rencana pemasangan CCTV di sejumlah titik di wilayah Kabupaten Badung, dibatalkan. Proyek yang di-agendakan terealisasi tahun 2016 ini, dialihkan pada

pemasangan Lampu Penerangan Jalan (LPJ). Padahal, DED alat pengintai kriminalitas itu telah rampung dikerjakan tahun 2015.

Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi (Dishubkominfo) Kabupaten Badung Wayan Weda Dharmaja, Minggu (22/11) mengatakan, rencana pemasangan CCTV di sejumlah titik di kecamatan Kabupaten Badung belum bisa dilakukan. “Kami sudah mengajukannya ke tim anggaran, namun belum mendapat persetujuan. Mungkin tahun 2017 rancangan tersebut bisa terealisasi,” ujarnya.

Menurutnya, untuk program tahun 2016 yang sudah disetujui anggarannya dalam RAPBD 2016 adalah program pembangunan dan fasilitas perhubungan seperti pengadaan dan pemasangan LPJ pada tempat-tempat strategis di Kabupaten Badung, rehabilitasi atau pemeliharaan LPJ di sejumlah titik jalan protokol milik Pemerintah Kabupaten Badung, serta pengadaan dan pemasangan LPJ Pantai Kuta. “Tahun 2016 yang menjadi prioritas dari 19 program yang akan dikerjakan adalah pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan LPJ. Kami berharap, dengan perbaikan secara bertahap ini, semua jalan di Kabupaten Badung bisa diterangi LPJ,” terang pejabat asal Desa Sembung ini. (kmb27)

Edisi : Selasa, 24 November 2015

Hal : 2



Khawatir Bermasalah, Perbup Batal Diterbitkan

Alokasi Bansos dan Hibah Jadi Silpa

Gianyar (Bali Post) -

Peraturan bupati (perbup) terkait dana bansos dan hibah akhirnya batal diterbitkan. Akibatnya, alokasi dana bantuan tersebut di APBD-P 2015 tak bisa dicairkan sehingga akan mengendap jadi silpa (sisa lebih perhitungan anggaran) di APBD 2016. Keputusan itu mengejutkan sejumlah pihak termasuk di lingkaran pemerintahan sendiri. Bahkan, hal ini disebut-sebut sebagai pemicu kisruh sidang paripurna DPRD Gianyar, Senin (23/11) kemarin.

Pembatalan dikeluarkannya perbup tersebut diungkapkan Wakil Bupati Gianyar I Made Mahayastra. Menurutnya, keputusan pembatalan itu dilakukan berdasarkan hasil rapat pimpinan yang melibatkan Ketua dan Wakil Ketua DPRD. "Terkait bansos-hibah, sempat tertunda sidang ini (sidang paripurna - red). Bupati siapkan perbup, karena sesuai janji, Bupati tadi tanda tangani perbup," katanya.

Mahayastra mengatakan, Bupati sebenarnya sudah menandatangani perbup yang bakal menjadi dasar hukum bagi pencairan dana bansos dan hibah bagi lembaga atau organisasi adat khususnya desa pakraman dan subak. Akan tetapi setelah dikoordinasikan kembali, muncul kekhawatiran bakal terjadinya ketimpangan perhatian terhadap organisasi atau lembaga lainnya jika perbup ini diterbitkan. Atas dasar itulah, perbup akhirnya tak jadi diterbitkan.

"Bantuan ke pakraman dan subak, itu yang ditandatangani. Tapi agar tidak memunculkan kesan pilih kasih, maka disepakati dana sebesar Rp 8 miliar yang diperuntukkan bagi hibah dan bansos APBD Perubahan 2015 kita gelontorkan ke APBD Induk 2016 untuk menjadi silpa. Jadi kesimpulannya tidak ada yang cair di tahun 2015 ini," kata Mahayastra.

Meski di APBD-P 2015 diputuskan tidak dicairkan, Mahayastra menyatakan, alokasi dana bansos dan hibah di APBD 2016 tetap akan dianggarkan. Bahkan jumlahnya akan lebih besar ketimbang rancangan sebelumnya atau sebesar Rp 23 miliar. Pasalnya, silpa yang berasal dari alokasi hibah dan bansos di APBD-P 2015 akan dialokasikan kembali di tahun anggaran 2016. "Tetap dianggarkan sebesar Rp 23 miliar ditambah dana silpa diluncurkan lagi Rp 8 miliar, jadi sekitar 31 miliar," katanya.

Mahayastra belum bisa memastikan apakah pencairan dana tersebut akan bisa dilakukan pada tahun anggaran 2016. Pihaknya menyatakan hal itu tergantung aturan. Pemkab Gianyar tidak ingin ada masalah terkait pencairan dana bansos dan hibah sehingga tidak mau buru-buru mengambil keputusan. "Kami tidak ingin ada masalah. Takut salah kebijakan. Sebab ternyata di provinsi, pergubnya akan ditarik," tegasnya.

Lebih lanjut pihaknya mengakui keputusan tersebut sangat berat dan memiliki konsekuensi politis. Apalagi fraksi di DPRD Gianyar khususnya PDI-P sangat ngotot memperjuangkan pencairan dana bansos-hibah. Namun pihaknya optimis masalah tersebut akan segera terselesaikan. "Saya yakin akan *clear*-lah. Pimpinan dewan akan koordinasikan hasil rapat pimpinan sebelum paripurna tadi," ujarnya. Sementara itu, Ketua DPRD Gianyar Wayan Tagel Winarta mengatakan, pihaknya sebenarnya cukup kecewa dengan keputusan tersebut. Akan tetapi, dia mengakui bahwa perbup tersebut masih memerlukan kajian hukum yang lebih mendalam. Selain itu, pihaknya juga masih menunggu kepastian mekanisme pencairan dana tersebut di tingkat provinsi.

Pihaknya masih berharap dana bansos dan hibah bisa dicairkan dengan persyaratan lebih sederhana, terutama untuk lembaga atau organisasi yang berkaitan dengan pelestarian adat dan budaya. "Sepanjang ada peluang kami tetap akan berusaha. Kalau tidak cair di 2015, akan dicairkan di 2016 dengan persyaratan yang harus dilengkapi," tegasnya. (kmb25)

Edisi : Selasa, 24 November 2015

Hal : 9



Optimalisasi PAD, Pendapatan Daerah

Pj. Wali Kota Denpasar Sampaikan RAPBD 2016

Dirancang Rp 1,87 Triliun Lebih



RANPERDA - Pj. Wali Kota Denpasar A.A. Gede Geriya menyerahkan pengantar Ranperda APBD Kota Denpasar dan enam Ranperda Kota Denpasar kepada Ketua DPRD Kota Denpasar I Gusti Ngurah Gede pada pembukaan sidang, Senin (23/11) kemarin, yang nantinya dapat dilakukan pembahasan bersama Fraksi DPRD Kota Denpasar.

PEMBUKAAN Sidang Paripurna DPRD Kota Denpasar, Senin (23/11) kemarin di Gedung DPRD Kota Denpasar, mengagendakan pidato pengantar Pj. Wali Kota Denpasar tentang penjelasan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Denpasar tahun Anggaran 2016 dan enam Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kota Denpasar. Sidang dibuka Ketua DPRD Kota Denpasar I Gusti Ngurah Gede. Sidang dihadiri seluruh anggota DPRD Kota Denpasar, Pj. Wali Kota A.A. Gede Geriya, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Denpasar, Sekda Kota Denpasar AAN Rai Iswara dan Pimpinan SKPD Pemkot Denpasar.

Pj. Wali Kota Denpasar A.A. Gede Geriya mengatakan, kebijakan yang akan dilakukan dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2016 adalah meningkatkan kemandirian pendanaan pembangunan di Kota Denpasar melalui optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD). Mengacu pada kebijakan tersebut, pendapatan daerah tahun anggaran

2016 dirancang Rp 1,87 triliun lebih yang berasal dari PAD, Dana Perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. PAD Denpasar dirancang Rp 715,32 miliar lebih yang berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta lain-lain PAD yang sah. Persentase kontribusi PAD terhadap APBD sebesar 38,14

persen, membawa Denpasar dikategorikan sebagai kota yang memiliki kemampuan fiskal cukup tinggi serta telah terjadi beberapa tahun terakhir ini.

Geriyana mengatakan, dana perimbangan pada tahun Anggaran 2016 dirancang Rp 794,01 miliar lebih, terdiri dari bagi hasil pajak dan bagi hasil bukan pajak, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus. Dana bagi hasil pajak dan

bagi hasil bukan pajak dirancang Rp 69,89 miliar lebih. Dana Alokasi Umum dirancang Rp 661,79 miliar lebih, Dana Alokasi Khusus dirancang Rp 62,32 miliar lebih.

Kebijakan belanja daerah yang terdiri dari belanja langsung dan belanja tidak langsung diarahkan untuk memenuhi belanja pegawai, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil kepada provinsi/kabupaten/

kota dan pemerintahan desa, serta belanja bantuan keuangan kepada provinsi/kabupaten/kota, pemerintah desa dan partai politik serta belanja tidak terduga. Belanja pegawai dirancang Rp 879,15 miliar lebih, belanja hibah dirancang Rp 34,09 miliar lebih, belanja bantuan sosial dirancang Rp 2,67 miliar lebih, belanja bagi hasil dirancang Rp 57,94 miliar lebih, belanja bantuan keuangan kepada pemerintah provinsi/kabupaten/kota, pemerintah desa dan partai politik dirancang Rp 152,19 miliar lebih, dan belanja tidak terduga dalam tahun anggaran 2016 dirancang Rp 3 miliar.

Dalam kesempatan tersebut, Pj. Wali Kota juga menyampaikan enam Ranperda yang terdiri dari Ranperda tentang Penyelenggaraan Kearsipan, Ranperda tentang Pengelolaan Cagar Budaya, Ranperda tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Ranperda tentang Pemondokan, Ranperda Izin Usaha Jasa Konstruksi, dan Ranperda tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata. (ad1279)

Edisi : Selasa, 24 November 2015

Hal : 2



Pantau Proyek Fisik di Nusa Penida Suwirta Minta Pengerjaan Dipercepat

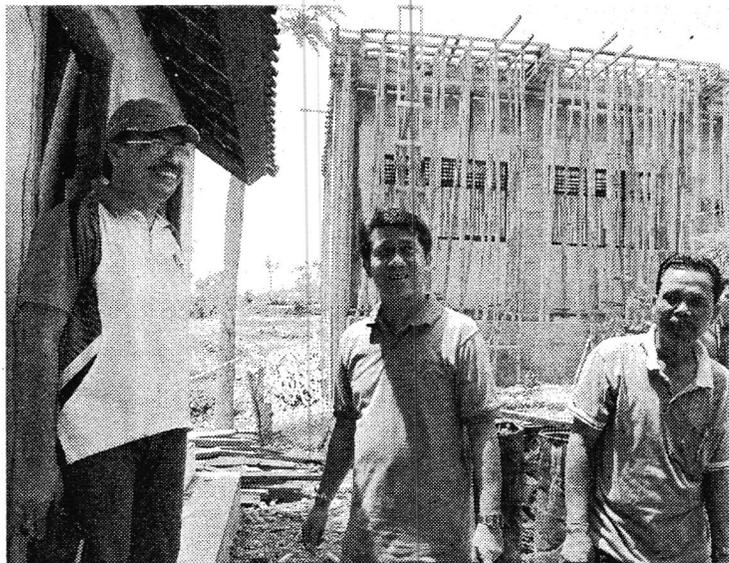
Semarapura (Bali Post) –

Adanya sejumlah proyek molor di Kecamatan Nusa Penida menjadi perhatian Bupati Klungkung I Nyoman Suwirta. Didampingi Sekkab Klungkung Putu Gede Winastra, Kepala Inspektorat Ida Bagus Sudarsana, Kabag Perengkapan Ketut Sena, dan Camat Nusa Penida Gusti Agung Gede Putra Mahajaya, Bupati turun ke lapangan untuk mengetahui pengerjaan proyek-proyek itu, Minggu (22/11).

Proyek pembangunan yang dipantau di antaranya rehab ruang belajar SMAN 1 Nusa Penida, pembangunan ruang kelas baru SMKN 1 Nusa Penida, rehabilitasi sedang/berat ruang guru SMPN 2 Nusa Penida, rehab ruang kelas SDN 2 dan 4 Sakti, serta pembangunan ruang kelas baru SMP satu atap Bunga Mekar.

Sejumlah proyek yang dikerjakan swakelola itu masih dalam tahap pengerjaan, sedangkan kualitasnya bervariasi. "Pengerjaannya harus dipercepat agar selesai sebelum tutup tahun," ujar Suwirta.

Bupati meminta kepada pihak rekanan untuk menambah jumlah tenaga kerja, sehingga



Bali Post/dwa

TURUN - Bupati Klungkung I Nyoman Suwirta (tengah) turun melihat sejumlah proyek yang ada di Nusa Penida.

proyek dapat dituntaskan sesuai rencana. Selain itu, ia mengajak masyarakat untuk bersama-sama mengawasi pengerjaan proyek, sehingga hasil yang diperoleh sesuai harapan bersama. "Masyarakat mesti ikut serta dalam pembangunan sekolah di daerahnya," kata bupati

asal Ceningan tersebut.

Molornya pengerjaan rehabilitasi sedang/berat ruang guru SMPN 2 Nusa Penida telah dicek tim monitoring dan evaluasi. Kendalanya antara lain jumlah tenaga kerja yang terbatas. Untuk itu, batas waktu pengerjaannya sudah diperpanjang. (dwa)

Edisi : Selasa, 24 November 2015

Hal : 10



Rencana Kenaikan Kesejahteraan Pegawai Diprioritaskan bagi Pejabat Setingkat Kadis

Mangupura (Bali Post) -

Para pejabat di Badung dipastikan makin sejahtera. Pasalnya, rencana kenaikan kesejahteraan pegawai di Badung tahun 2016 lebih diprioritaskan bagi pejabat setingkat kepala dinas (kadis). Rencana kenaikan ini juga sempat dipersoalkan Dewan, lantaran belum mendapat persetujuannya. Draf perbup mengenai kenaikan tambahan penghasilan ini, juga belum disampaikan ke Dewan.

Data yang diperoleh, dari Rp 408 miliar anggaran kenaikan kesejahteraan pegawai di Badung, rata-rata pejabat eselon II setingkat kepala dinas menerima di atas Rp 20 juta sebulan. Bahkan, ada yang mencapai Rp 30 juta. Sementara staf non-PNS hanya menerima rata-rata Rp 2 juta sebulan.

Anggota Komisi III DPRD Badung I Wayan Sandra mengatakan, pihaknya tidak pernah menolak adanya tambahan penghasilan bagi pegawai. "Kami tidak menolak, kami sangat setuju. Namun dengan catatan, harus sesuai prosedur dan menunjukkan rasa keadilan kepada pegawai," ungkap Sandra, Senin (23/11) kemarin.

Sandra sendiri mengaku tahu soal rencana besaran kenaikan. Namun, politisi PDI-P

ini menegaskan, sesuai aturan, rencana kenaikan tersebut harus dengan persetujuan Dewan. "Berikan kami *breakdown*-nya untuk dibahas. Kami ingin ada rasa keadilan untuk pegawai, jangan sampai ada ketimpangan yang mencolok," tegasnya.

Dalam rancangan tersebut, juga terungkap jika tambahan penghasilan pegawai tertinggi diperoleh Sekda yang mencapai Rp 31.780.000 per bulan. Disusul, Kepala Bappeda dan Litbang, Kepala Inspektorat dan Asisten Setda Rp 30.030.000. Selanjutnya Kabag Keuangan menerima Rp 27.298.000, Sekwan menerima Rp 27.334.000, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran mendapatkan Rp 25.461.000, Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi Rp 25.404.000, Kasat Pol PP Rp 25.161.000.

Untuk kepala dinas lainnya, rata-rata Rp 24 juta, dan terendah diterima Kepala Dinas Pendapatan Rp 23.350.000. Itu pun karena yang bersangkutan telah menerima upah pungut (UP). Kabag di Setda

juga mendapatkan sangat besar. Selain Kabag Keuangan yang tambahan pengasilannya mengalahkan kepala dinas, kabag lainnya juga sangat besar. Kabag Administrasi Umum, Kabag Administrasi Kesejahteraan Rakyat, Kabag Ortal, Kabag Perekonomian, Kabah Humas menerima Rp 23.943.000.

Bagaimana dengan pegawai biasa? Staf PNS golongan I di Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga hanya menerima Rp 2.931.500, sedangkan staf non-PNS dengan ijazah SD

menerima Rp 2.588.000. Rata-rata staf PNS golongan rendah menerima antara Rp 2,5 juta hingga Rp 4 jutaan. Timpangnya kenaikan kesejahteraan antara pejabat dengan pegawai ini, sangat disesalkan kalangan DPRD Badung.

Kabag Humas dan Protokol Badung Anak Agung Gede Raka Yuda mengatakan, selama ini anggaran Kabupaten Badung selalu mendapat juara I nasional. Itu sebagai bukti Pemkab Badung tidak pernah main-main terhadap anggaran.

"Tambahan ini hanya dinikmati 34 persen oleh pegawai. Sisanya 66 persen, asas manfaat, seperti biaya operasional sehingga dapat meningkatkan kinerja pegawai," ujarnya.

Pihaknya membantah kenaikan ini tidak dibahas sebelumnya dengan DPRD. "Prosesnya sudah dibahas sejak awal dalam KUA-PPAS. Setelah dibahas, barulah disesuaikan dengan RKPA. Itu artinya, seharusnya tidak ada masalah," tandasnya. (kmb27)

Edisi : Selasa, 24 November 2015

Hal : 3



Sejumlah Proyek Gagal Tender Dua Digagas Bupati

Semarapura (Bali Post) –

Penyebab terhambatnya pembangunan di Kabupaten Klungkung selain karena keterbatasan anggaran, juga akibat banyaknya proyek yang gagal tender. Seperti pada akhir November ini, ada sejumlah proyek yang dinyatakan gagal tender dengan berbagai persoalan. Akibatnya, anggaran miliaran yang seharusnya dapat digunakan untuk mengembangkan pembangunan hanya menjadi sisa lebih pembiayaan anggaran (silpa).

Proyek yang mengalami gagal tender termasuk dua yang digagas Bupati Klungkung I Nyoman Suwirta, yakni pengadaan LED display dan pemasangan palang pintu elektronik di Pasar Galiran. Pengadaan LED display yang sempat bermasalah dengan tempat pemasangan tidak terealisasi karena tidak ada penawaran yang yang lulus evaluasi. Sementara proyek palang pintu elektronik di Pasar Galiran gagal disebabkan tidak adanya penyedia yang memasukkan dokumen penawaran.

Proyek gagal tender lainnya adalah pengadaan personal komputer untuk pelaksanaan UN Computer Based Test (CBT).

Proyek yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Klungkung ini tidak terealisasi karena tidak ada yang memasukkan dokumen penawaran sampai batas waktu yang ditentukan. Dengan demikian, pengadaan komputer yang rencananya untuk SMPN 2 Semarapura tersebut tidak terealisasi.

Kadisdikpora Kabupaten Klungkung I Nyoman Mudarta dihubungi Senin (23/11) kemarin, membenarkan kegagalan tender pengadaan komputer. Meski begitu, pihaknya masih berupaya merealisasikan proyek ini dengan memohon perpanjangan waktu proses tender. Permohonan untuk memperpanjang tender proyek dengan anggaran Rp 493,1 juta ini telah sampai di meja Sekda Klungkung.

Pengadaan komputer di SMP Negeri 2 Semarapura nantinya digunakan dalam pelaksanaan UN 2016 yang menggunakan sistem *computer based test*. "Untuk memenuhi kebutuhan komputer pada UN sistem CBT, kami hanya bisa memenuhinya secara bertahap," ungkap Mudarta. (dwa)

Edisi : Selasa, 24 November 2015

Hal : 10



Tolak Reklamasi

Rakyat Bali Berjuang Sendirian

Denpasar (Bali Post) -

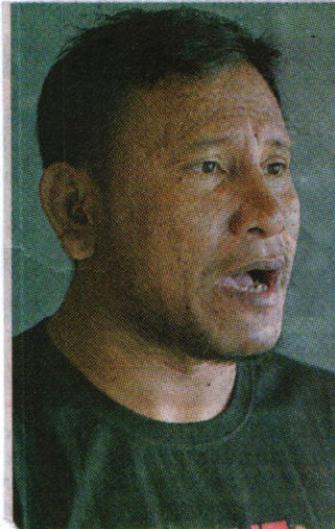
Pernyataan Megawati Soekarnoputri terkait reklamasi Teluk Benoa disebut hanya menambah deretan elite politik yang tidak berani tegas menolak rencana itu. Sebelumnya, Megawati tidak ingin dikatakan tidak setuju dengan reklamasi. Meskipun Ketua Umum PDI Perjuangan ini menekankan, kalau mau melakukan sebuah reklamasi, maka yang harus betul diperhatikan adalah masalah lingkungannya. Atau secara teknis adalah masalah amdal-nya secara detail.

"Alasan-alasan formal selalu saja dikedepankan mulai dari kesesuaian amdal dan lain-lain.

Seolah-olah rencana reklamasi ini proyek yang tidak punya *track record* buruk dalam pelaksanaannya selama ini," ujar Koordinator ForBALI Wayan "Gendo" Suardana, Senin (23/11) kemarin, menyebut Megawati telah menutup mata terhadap polemik reklamasi Teluk Benoa selama tiga tahun terakhir. "Saat Megawati menyatakan bahwa sikapnya semata-mata diletakkan pada amdal maka Megawati pada saat itu telah menutup mata atas berbagai praktik buruk untuk mewujudkan keinginan investor mereklamasi teluk," jelasnya.

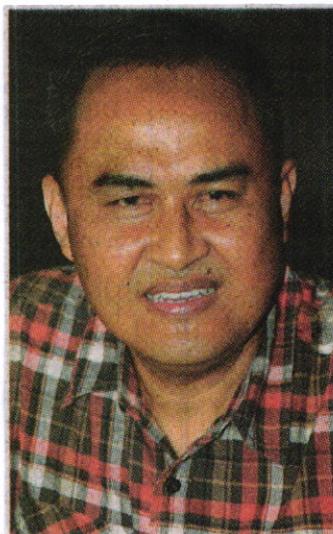
Hal. 19

Kawasan Suci



"Saat Megawati menyatakan bahwa sikapnya semata-mata diletakkan pada amdal maka Megawati pada saat itu telah menutup mata atas berbagai praktik buruk untuk mewujudkan keinginan investor mereklamasi teluk."

Wayan Gendo Suardana
Koordinator ForBALI



"Pantas saja selama ini wakil-wakil rakyat cenderung menutup telinga terhadap aspirasi masyarakat Bali. Kini semakin jelas bagi krama Bali, bahwa kita akan terus berjuang sendiri tanpa bantuan siapa-siapa. Kita akan berjuang sampai Perpres 51 Tahun 2014 dicabut dengan kekuatan rakyat."

Gede Bangun Nusantara
Ketua Forum Peduli Bali Dwipa



Kawasan Suci

Dari Hal. 1

Pada saat yang sama, lanjut Gendo, Megawati juga telah lupa bahwa Teluk Benoa adalah kawasan suci yang tentu tidak sesederhana itu untuk direklamasi. Sebagai sosok yang banyak mendapat tuah dari tanah Bali, seharusnya Megawati berani bersikap lebih tegas untuk menjaga tanah Bali.

Ketua Forum Peduli Bali Dwipa Gede Bangun Nusantara mengatakan, Megawati telah memberikan pernyataan yang gamblang mendukung reklamasi asal sesuai aturan. "Pantas saja selama ini wakil-wakil rakyat cenderung menutup telinga terhadap aspirasi masyarakat Bali. Kini semakin jelas bagi *krama* Bali, bahwa kita akan terus berjuang sendiri tanpa bantuan siapa-siapa. Kita akan berjuang sampai Perpres 51 Tahun 2014 dicabut dengan kekuatan rakyat," ujarnya.

Bangun Nusantara menambahkan, masyarakat Bali tidak perlu para pemimpin yang tidak hadir ketika rakyatnya membutuhkan. Partai politik dan orang-orangnya sudah terbukti tidak memihak rakyat dalam masalah reklamasi Teluk Benoa.

Sebelumnya, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati

Soekarnoputri menekankan, kalau mau melakukan sebuah reklamasi, maka yang harus betul diperhatikan adalah masalah lingkungannya. "Teknisnya adalah masalah amdal-nya. Jangan hanya dilihat dari sisi amdal sudah semuanya dikatakan beres. Tapi juga harus ada spesifikasinya," ujarnya (BP, 23/11).

Megawati menambahkan, kalau ada rencana reklamasi, terlebih dahulu harus dilihat bagaimana masalah pergeseran air laut. Mengingat, reklamasi akan membawa pengaruh pada ekosistem laut seperti terumbu karang, ikan, dan plankton, serta masalah angin. Hal-hal spesifik itu harus diperhatikan secara detail. Sebab, setelah reklamasi terjadi akan banyak membawa perubahan di kawasan Teluk Benoa khususnya.

"Tetapi jangan lalu nanti ditulis Ibu Mega tidak setuju dengan reklamasi, itu tidak seperti begitu saya katakan. Tapi ini harus diimbangi karena kalau sekiranya reklamasi itu sudah memenuhi persyaratan lingkungan, maka sebenarnya kan kalau dibuat dan dilakukan hal-hal yang sifatnya ekonomi sosial itu kan berarti bisa menambah nilai tambah bagi warga Bali sendiri kalau khususnya bicara di Bali," imbuhnya. (kmb)



Upaya Dapatkan DAK Revisi UU 64/1958 Mendesak

Denpasar (Bali Post) -

Revisi Undang-undang No. 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Bali, NTB, dan NTT dinilai lebih mendesak ketimbang revisi Undang-undang No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah. Pasalnya, revisi UU 64 dengan menyebutkan potensi-potensi Bali akan membuat pemerintah pusat berkewajiban untuk menjaga potensi-potensi itu melalui Dana Alokasi Khusus (DAK).

“Struktur APBN yang dikeluarkan pemerintah pusat, di situ jelas disebutkan bahwa DAK itu bisa fisik, bisa non-fisik. Cuma penggunaannya pasti untuk apa. Seperti di Denpasar karena memiliki prestasi IPM (Indeks Pembangunan Manusia) tertinggi, maka dia memiliki hak untuk memohon DAK yang cukup besar sehubungan dengan apa yang dia mau untuk mempertahankan IPM,” ujar anggota Komisi II DPRD Bali, A.A. Ngurah Adhi Ardhana, di gedung dewan,

Senin (23/11) kemarin.

Adhi Ardhana menambahkan, hitung-hitungan besar kecilnya DAK yang didapat memang harus digali kembali. Tapi paling tidak, peluang untuk mendapatkan DAK terkait daerah berprestasi itu lebih besar. Terutama bagi Bali apabila pemerintah bisa menyebutkan potensinya secara spesifik. Maka DAK untuk potensi itulah yang bisa didapatkan nantinya.

“Sekarang kalau kita mau ngomongin kita mau minta PPh badan, PPN, terus kalau

semua daerah melakukan hal itu, kan berlaku umum ini. Terus pemerintah pusat siapa yang membiayai? Tidak ada,” jelasnya.

Adhi Ardhana melanjutkan, tidak akan bisa kalau Bali meminta bagi hasil dari pariwisata. Sebab, pendapatan negara bukan pajak hanya bersumber dari visa dan visa *on arrival* yang besarnya Rp 1,4 triliun saja. Itu pun akan menjadi nol pada 2016 karena diberlakukan bebas visa.

Berbeda dengan Adhi Ard-

hana, Koordinator Pansus Revisi UU No. 33 Tahun 2004 dan UU No.64 Tahun 1958 DPRD Bali, Dr. Nyoman Sugawa Korry justru lebih getol ingin merevisi UU 33. Pasalnya, UU 33 dinilai tidak adil bagi daerah yang tidak punya sumber daya alam. Sugawa menambahkan, dalam dana bagi hasil yang bersumber dari pajak pun Bali masih merasa sangat tidak adil karena hanya baru masuk PPh perorangan, belum termasuk PPh badan dan PPN. Padahal di negara-negara lain sudah konsisten mengenakan pajak untuk wisatawan. Sedangkan dalam UU No. 33 sekarang belum diatur.

“Terhadap hal-hal itulah usulan kita sampaikan. Kenapa hal ini dipandang tidak relevan. Sekecil apa pun Bali diuntung-

kan dalam konteks revisi UU ini, kita harus perjuangkan bersama-sama,” jelasnya.

Terkait UU 64, Sugawa mengharapkan sinergi antara anggota DPD-RI dan DPR-RI untuk bekerja sama secara proaktif menyusun rumusan perubahan yang diharapkan. Dalam hal ini, politisi Golkar ini menyebut perubahan tidak sama dengan revisi. “Kita usulkan UU tentang Provinsi Bali, dengan harapan teman-teman DPR-RI dan DPD-RI lebih proaktif ikut mempersiapkannya, dan jangan sampai “kasep tangkis” lagi seperti lahirnya UU tentang Desa, yang tidak mampu memperjuangkan eksistensi adat dan budaya Bali dalam UU tersebut,” tandasnya. (kmb32)

Edisi : Selasa, 24 November 2015

Hal : 7